

FUTURES  KONTRAK

BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS

100





DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

F U T U R E S  K O N T R A K

BERJANGKA
MENGABDI DENGAN INTEGRITAS

Kembali ke Khitah UU No.32/1997

TANPA disadari, pada Juli 2009 ini Bulletin Kontrak Berjangka BAPPEBTI telah mencapai edisi ke-100. Jika diperhitungkan, sekitar 8 tahun lebih 10 bulan sudah perjalanan kami menemani pembaca, dalam rangka turut terlibat dalam proses pengembangan bisnis perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pembaca, yang telah setia bersama kami dan turut memberikan dukungan demi kemajuan Bulletin yang kita cintai ini.



Dalam rentang waktu yang cukup lama ini, tentu sudah cukup banyak perbaikan fisik bulletin yang kami lakukan. Tentu saja hal tersebut juga demi penyegaran tampilan serta menambah kandungan isi Bulletin menjadi kian baik dan berbobot. Sebab, menjadi media yang menyajikan segmen khusus tentu tidak mudah. Selain mensosialisasikan dunia bisnis perdagangan berjangka, juga bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karenanya, demi perkembangan Bulletin kita selanjutnya, kami memohon

doa restu dari para pembaca, agar dapat lebih keras berpijak dan berinovasi dalam tugas demi mengemban visi dan misi ke depan. Pada edisi istimewa ini, kami juga menyajikan rubrikasi unik dan menarik. Salah satunya, mengenai wawancara eksklusif kami dengan Kepala BAPPEBTI Deddy Saleh, Dirut ICDX Megain Wijaya dan Dirut ISI Ferry A Sangeroki, serta sumbangsih saran terhadap

kemajuan perdagangan berjangka komoditi dari beberapa mantan Kepala BAPPEBTI.

Pada bulan Juli ini, bangsa Indonesia kembali berduka. Teror bom telah menghantam Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott. Bahkan untuk Hotel JW Marriott, justru ledakan tersebut merupakan kali kedua setelah sebelumnya juga sempat porak-poranda pada tahun 2003. Ulah teroris yang konon masih didalangi kelompok Noerdin M Top ini tentu menyakitkan rakyat Indonesia. Apalagi kelompok Noerdin saat beroperasi kerap mengkambinghitamkan jihad, sehingga melukai umat Islam yang menjadi masyarakat mayoritas di tanah air. Kelicikan warga Malaysia ini juga terlihat, saat memanfaatkan “kebodohan” beberapa pemuda Indonesia untuk menjadi “pengantin” bom bunuh dirinya.

Meski berhasil menggelar aksi bom, tetapi kelompok Noerdin ini tampaknya gagal menggoyang perekonomian Indonesia. Meski grup sepakbola asal Inggris Manchester United gagal mengunjungi Indonesia, dan travel warning ke Indonesia sempat dikeluarkan berbagai negara, toh tidak cukup mampu menghapus kepercayaan pihak asing. Bisnis perdagangan berjangka di tanah air pun tercatat tidak turut terpengaruh atas insiden bom yang memalukan itu. Semoga kelompok teroris segera dapat diberangus di bumi pertiwi. Dan mari kita doakan terus yang terbaik untuk perbaikan ekonomi pada umumnya, dan perkembangan bisnis perdagangan berjangka komoditi pada khususnya. Amin. ▲

20 KOMODITI

Nanas Buah Tropis nan Manis



26 AKTUALITA

- Bappebti Menang atas Gugatan GFB
- Pelaku SPA Wajib Laporkan Transaksi
- Bank Century Kembali ‘Berseri’
- Bappebti Sarankan Kasus PBK Ditangani Unit Khusus
- Single Platform Tunggu ‘Lampu Hijau’ BBJ

24 BERJANGKA

PP No. 17 ‘Dihajar’
Judicial Review



28 KIPRAH

Winy E Hassan:
BPD Harus Cepat
Respon SRG



Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi **Penasehat/Penanggung Jawab:** Deddy Saleh
Pemimpin Redaksi: Chrisnawan Triwahyuardianto **Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Natalius Nainggolan
Dewan Redaksi: Yusuf Affandi, Lili Yuliana S, Dian Sandita Arisanti, Suhendro, Ambre Satria P, Sri Sundayani, Poppy Juliyanti
Sirkulasi: Sapin Siswanto, Katimin **Alamat Redaksi:** Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat
www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail: berbakti@bappebti.go.id

Buletin Kontrak Berjangka 100



Tanpa terasa, Buletin Kontrak Berjangka yang diterbitkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), sudah memasuki usia penerbitan edisi ke-100. Itu artinya, bulletin yang ada digenggam pembaca ini sudah dalam usia delapan tahun merekam jejak perjalanan perdagangan berjangka.

Penerbitan ke-100 memang belum bisa dibanggakan bila dibandingkan dengan media lain yang lebih dahulu. Tetapi sedikit melihat kebelakang, proses perjalanan media ini memiliki cita-cita yang luhur. Yakni, menjadi media sosialisasi dan edukasi dibidang perdagangan berjangka komoditi.

Apakah cita-cita itu sudah tercapai? Tentunya dapat dikatakan belum. Sebab, sepanjang perjalanan industri perdagangan berjangka masih tetap diperlukan sosialisasi dan edukasi. Apalagi masyarakat Indonesia umumnya belum sepenuhnya merasakan manfaat ekonomis dari industri perdagangan berjangka komoditi.

Oleh karenanya, Bappebti sebagai lembaga yang diberi mandat mengawasi berjalannya perdagangan berjangka di tanah air masih menganggap penting kehadiran media ini. Apalagi mengingat tugas dan tanggungjawab Bappebti yang semakin kompleks dengan tambahan sektor yang diawasi dan dibina. Yakni,

sistem resi gudang dan pasar lelang komoditi agro.

Terbitan perdana Bulletin Kontrak Berjangka diawali pada bulan Maret 2001. Kala itu industri perdagangan berjangka baru berjalan sekitar tiga bulan lebih. Adalah mantan Kepala Bappebti, Ridwan Kurnaen, yang pada awal tahun 2001 menggagas penerbitan media ini. Setelah melalui proses diskusi dan perbincangan, penerbitan perdana baru dapat direalisasikan pada bulan Maret 2001.

Layaknya sebuah institusi, Bulletin Kontrak Berjangka juga mengalami pasang surut. Pada peberbitan perdana, bulletin ini terbit dengan 12 halaman itu pun dengan kertas yang cukup sederhana. Tetapi kini terbit lebih dari dua kali lipat atau tepatnya 28 halaman dengan tampilan *fullcolor*.

Di tahun 2005, bulletin ini pun pernah mengembangkan dan mengeluarkan *supplement* Pasar Lelang. Hal itu terkait dengan kebijakan Bappebti yang mengembangkan pasar lelang agro di sejumlah daerah. Namun pada akhirnya *supplement* Pasar Lelang itu ditiadakan dan dijadikan rubrikasi khusus di Bulletin Kontrak Berjangka.

Di bagian rubrikasi, bulletin ini pun telah berulang-ulang mengalami perubahan, demikian pula dari sisi tampilan. Hal itu pada dasarnya ditujukan untuk memperkaya dan mempererat hubungan yang harmonis antara redaksi dan para pembaca. Oleh karenanya, respon dari para pembaca sangat menentukan eksistensi bulletin ini.

Perjalanan media ini ke depan pastinya masih sangat panjang. Dan tanggungjawabnya pun sebagai salah satu pilar yang dapat memberi pencerahan kepada masyarakat, tentang perdagangan berjangka, system resi gudang dan pasar lelang komoditi masih perlu diuji. Oleh karenanya, redaksi senantiasa menanti dan mengharapkan masukan dan kritik dari para pembaca dalam membangun dan mengembangkan Bulletin Kontrak Berjangka yang kita cintai ini.

Untuk penerbitan edisi ke 100 ini, redaksi mencoba menyuguhkan laporan dan harapan dari para mantan Kepala Bappebti akan industri perdagangan berjangka komoditi. Topik ini dipilih redaksi sebagai refleksi penerbitan perdana Bulletin Kontrak Berjangka di tengah berdirinya bursa berjangka dan lembaga kliring baru. ▲

Kembali ke Khitah UU No.32/1997

Pasang-surut perjalanan industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air selama kurun waktu delaman tahun, cukup menyedot perhatian para pelaku pasar, masyarakat dan pemangku kebijakan. Betapa tidak, Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang beroperasi pada 22 Desember 2000, dengan menawarkan kontrak berjangka komoditi kopi, *crude palm oli* (CPO) dan *olein-* minyak goreng, tak mampu berbuat banyak. UU No. 32/1997, tentang perdagangan berjangka komoditi, yang mengayomi perdagangan berjangka komoditi di tanah air terkesan kaku, dengan munculnya sikap para pelaku pasar yang lebih menginginkan perdagangan berjangka dalam bentuk lain. Yakni perdagangan di luar bursa, atau populer disebut *over the counter* (OTC) dengan memperdagangkan kontrak berjangka produk keuangan asing.

Bursa yang diharapkan sebagai sarana *price discovery* (pembentukan harga) dan *hedging* (lindung nilai), akhirnya tunduk dari mekanisme pasar yang menghendaki tujuan lain itu. Apa yang salah dari UU No. 32/1997, itu? Tentunya sebagai produk perundang-undangan tidak ada yang kurang dan amanat undang-undang itu pun cukup jelas. Meski harus diakui undang-undang tersebut tidak seutuhnya sempurna.

Namun untuk menyelamatkan industri perdagangan berjangka yang sudah dibangun dengan penuh pengorbanan, tak ada pilihan lain bagi otoritas untuk mengamini keinginan para pelaku pasar itu. Sebab bila pilihannya tetap mempertahankan tujuan pendirian bursa yang sesuai dengan undang-undang, dapat dipastikan satu per-

satu para pelaku pasar akan rontok. Tidak mampu menahan besarnya beban biaya operasional sementara pemasukan dari perdagangan berjangka sangat minim.

Untuk mengamankan transaksi perdagangan berjangka yang dilakukan masyarakat-investor dan mengakomodasi keinginan para pelaku pasar, pihak otoritas bursa pun putar otak. Akhirnya, pada awal tahun 2005, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan kebijakan yang mengawal perdagangan di luar bursa. Keluarnya kebijakan itu dilandasi SK Kepala Bappebti No.55/2005, tentang sistem perdagangan alternative.

Bagi sebagian kalangan, keluarnya kebijakan itu bisa dianggap kemunduran dari tujuan perdagangan berjangka yang diamanatkan undang-undang. Tetapi di masa itu, kebijakan tersebut merupakan pilihan yang tepat untuk mengamankan investasi masyarakat. Di sisi lain, keluarnya kebijakan itu didasari adanya 'kesepakatan' dan harapan bersama antara otoritas dan para pelaku pasar, yang dalam jangka menengah tatanan atau struktur industri perdagangan berjangka dapat diperbaharui sesuai undang-undang.

Agaknya, pembaharuan tatanan industri perdagangan berjangka itu kini tengah dimulai dan berproses. Sejumlah kebijakan baru dari Kepala Bappebti, Deddy Saleh, telah menggiring para pelaku pasar yang bermain di arena OTC mengikuti peraturan yang sesuai dengan amanat undang-undang. Hal ini ditempuh mengingat sejumlah pelaku pasar sudah bisa mengatasi beban biaya operasional yang tinggi, bahkan mampu meraup laba.

Selain itu, adanya harapan instrument perdagangan berjangka komoditi menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan Bappebti yang mengedepankan tegaknya UU No. 32/1997, tampak dari keluarnya izin pendirian bursa berjangka dan lembaga kliring baru. Izin pendirian bursa itu diberikan kepada PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) dan lembaga kliring kepada PT Identrust Security International (ISI).

Keluarnya dua izin pelaku perdagangan berjangka komoditi itu diharapkan mampu mengangkat kontrak berjangka komoditi primer yang dihasilkan masyarakat Indonesia. Khususnya komoditi CPO dan emas, yang rencananya akan dilansir BKDI pada Oktober 2009 mendatang. Komitmen BKDI yang akan memperdagangkan kontrak komoditi primer itu, tentunya menjadi harapan tegaknya UU No.32/1997. Sekaligus sebagai ajang pembuktian bahwa Indonesia pun mampu berbicara di pasar internasional dengan hadirnya sarana *price discovery* dan instrument lindung nilai.

Kebijakan lain dari Bappebti demi tegaknya UU Bo.32/1997 yakni menata para pelaku pasar yang bermain di area OTC. Kebijakan itu dimulai dari mengatur perilaku para pelaku pasar, meningkatkan jumlah modal bersih disesuaikan, menggunakan sistem perdagangan yang terintegrasi antara pelaku pasar dan otoritas bursa. Adanya batas minimum transaksi kontrak berjangka komoditi primer dari setiap perusahaan pialang berjangka. Serta, dibentuknya unit kerja direktur kepatuhan disetiap perusahaan pialang berjangka. ▲

Pengantar Redaksi: terkait dengan penerbitan edisi ke 100 *Buletin Kontrak Berjangka* dan keluarnya izin baru dua pelaku pasar perdagangan berjangka, yakni PT Bursa Komoditi Derivatif Indonesia dan PT Identrust Security International, redaksi melakukan wawancara khusus dengan Kepala Bappebti, Deddy Saleh. Sejumlah harapan terhadap perkembangan industri perdagangan berjangka di tanah air terlontar darinya. Dan, apa saja yang tengah diupayakan Bappebti untuk mencapai tujuan itu? Berikut ini petikannya.



Kontrak Berjangka Komoditi 'Harga Mati'

Bappebti mengeluarkan dua izin baru pelaku pasar, apa yang diharapkan dari pelaku pasar tersebut?

Sesuai fungsi dan tugas Bappebti, kita tetap fokus ingin mengembangkan usaha perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Targetnya dalam waktu dekat di Indonesia harus ada *price reference*. Seperti sekarang yang sedang digarapkan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), mengembangkan pasar fisik CPO. Memang pasar fisik tidak diamanatkan oleh undang-undang, tetapi instrument ini penting sebagai penunjang perdagangan berjangka. Makanya BBJ saya izinkan melakukan itu. Kalau pasar fisik CPO-nya kuat, ada keyakinan futures trading akan jalan. Oleh karena itu, seharusnya pasar fisik BBJ mendapat dukungan dari semua pihak.

Bentuk dukungan seperti apa?

Pasar fisik CPO itu harus ada insentif. BBJ sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan, dengan dukungan dari Bappebti serta Menteri Perdagangan. Mungkin bentuk insentif yang tepat adalah PPN yang

ditanggung pemerintah. Seperti halnya produk Minyak Kita. Tetapi persoalannya usulan untuk itu harus dimasukkan ke dalam APBN. Dan mendapat persetujuan dari DPR dulu.

Apa target Bapak dalam jangka pendek dibidang perdagangan berjangka?

Target di PBK sebetulnya keinginan saya, dua atau tiga tahun ke depan sudah ada produk yang *price reference*-nya di Indonesia. Tapi ya, harus dapat dukungan dari pemerintah. Sebetulnya sudah jelas *guidance* dari pemerintah. Mengembangkan dan lain sebagainya, tinggal bagaimana usaha dan kemampuan kita melaksanakan amanat itu.

Rencananya BKDI akan memperdagangkan kontrak CPO, dan BBJ pun merencanakan memperdagangkan CPO, apa pendapat Bapak?

BKDI memperdagangkan CPO menurut saya itu sudah tepat. Tetapi kalau BBJ ingin mengeluarkan hal yang sama, saya tidak tahu. Kita lihat saja nanti. Kalau keduanya lancar, itu nggak masalah. Secara peraturan, atau secara undang-undang itu tidak dilarang. Cuma, alangkah eloknya jika masing-masing punya spesialisasi. Kalau mereka mau bertempur, silahkan saja.

Dan kalau mereka mengajukan, akan saya izinkan. Tetapi sebelumnya saya jelaskan dulu risikonya, salah satu bisa *colaps*. Tetapi kalau mereka mau *trial and error* ya tidak apa-apa. Seperti saya katakan, tidak usah ragu-ragu atau malu-malu untuk *trial dan error*. Dulu kan harus ada study dari konsultan asing segala, kalau bagi saya nggak. Dengan study yang dilakukan BBJ sendiri sudah cukup. Kan risikonya ada pada dia? Jadi dia lihat saja. Karena tidak ada jaminan bahwa konsultan asing itu akan berhasil. Pengalaman sudah menunjukkan, dulu kontrak kopi studinya dilakukan konsultan asing. Hasilnya apa? Kurang bagaimana study-nya itu?

Di bursa London yang saya kunjungi, saya tanya berapa perbandingannya antara kontrak yang eksis dengan kontrak yang tidak likuid. Jawab mereka, dari 25 kontrak yang dikeluarkan keberhasilannya berbanding satu. Jadi memang sejarahnya semua bursa begitu, tidak semua kontrak yang diluncurkan itu akan berhasil. Tetapi saya mengharap *price reference* CPO bisa ada di Indonesia, apalagi saat ini Indonesia sudah merupakan produsen utama CPO dunia. ▲

Indonesia Perlu Bursa Berjangka Komoditi

Suatu negara yang menganut ekonomi pasar seperti Indonesia, instrument perdagangan berjangka sangat diperlukan. Pentingnya instrument itu sebagai sarana lindung nilai dan informasi pembentukan harga. Namun mengapa industri perdagangan berjangka yang sudah dirintis sejak tahun 2000 tak kunjung mekar dan manfaat ekonomisnya pun tak dapat dinikmati masyarakat?

Agaknya pertanyaan itu akan terjawab dari petikan wawancara redaksi dengan sejumlah mantan Kepala Bappebti yang berhasil ditemui, yakni Arifin Lumban Gaol, Ridwan Kurnaen, Ardiansyah Parman dan Titi Hendrawati. Sedangkan mantan Kepala Bappebti, Gusmardi Bustami, hingga materi ini disusun belum berhasil ditemui.



Ir. Arifin Lumban Gaol
Kepala Bappebti 1991-2001



Drs. Ridwan Kurnaen MBA
Kepala Bappebti 2001-2002



Gusmardi Bustami SH
Kepala Bappebti 2002



Ir. Ardiansyah Parman
Kepala Bappebti 2002-2005



Titi Hendrawati
Kepala Bappebti 2005-2008

► Laporan UTAMA ◀

Lambannya perkembangan industri perdagangan berjangka di Indonesia agaknya belum mendapat prioritas dari pemerintah. Padahal industri berjangka ini sangat strategis dan harus ada di suatu negara yang menganut ekonomi pasar. Perdagangan berjangka yang diamanahkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1997, untuk menyediakan alat (tool) dan forum bagi peserta industri perdagangan berjangka dalam menghadapi risiko harga yang melekat (inheret) dalam perdagangan fisiknya (*cash transaction*), belum terwujud. Padahal, perekonomian Indonesia yang begitu terbuka, sangat berisiko dari guncangan harga yang dihadapi dunia usaha. Termasuk juga pemerintah, yang semakin hari semakin besar ketergantungannya dengan faktor-faktor perekonomian dari luar negeri.

Memang banyak factor yang disyaratkan untuk berkembangnya sebuah industri perdagangan berjangka. Diantaranya, situasi makro ekonomi di dalam negeri harus stabil, tersedianya infrastruktur yang mendukung kelancaran perdagangan berjangka. Di samping itu, adanya komitmen dari aktor bisnis.

Bahwa kenyataannya yang berkembang di masyarakat adalah perdagangan berjangka di luar bursa atau dikenal dengan sistem perdagangan alternative (SPA), namun bukan itu amanah (domein) UU No. 32/1997. Dan fungsinya perdagangan dengan sistem ini lebih banyak untuk spekulasi. Dan secara ekonomis, manfaatnya sangat kecil dalam mendukung upaya stabilitas ekonomi nasional.

Buruknya citra perdagangan berjangka di masyarakat karena perdagangan berjangka ini banyak merugikan masyarakat dan penipuan dan dikesankan sebagai judi. Edukasi dan pemasyarakatan tentang industri berjangka ini harus dilakukan lebih intensif lagi. Kesan negatif yang ada dipikiran masyarakat itu harus dikikis dan penegakan hukum bagi pelanggarnya harus tegas.

Ketentuan perdagangan SPA harus di-review, namun tidak perlu dilarang akan tetapi diatur dalam peraturan (modul) tersendiri di luar UU No. 32/1997. Yang terbaik adalah dalam bentuk undang-undang dengan persyaratan yang berat dan ketentuan yang ketat. Karena bisnis ini sangat berisiko. Persyaratan modalnya harus besar dan pesertanya harus selektif.

Bisnis SPA ini seyogianya hanya untuk professional investor yang memiliki kemampuan keuangan yang besar serta memiliki pengetahuan yang tinggi model UU di bidang SPA yang dapat dicontoh adalah *Leverage Foreign Exchange Trading Ordinance* dari pemerintah Hongkong.

UU No. 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi memang tidak membatasi jumlah bursa yang akan didirikan di Indonesia karena begitu banyak komoditi yang dihasilkan di dalam negeri maupun barang impor yang memerlukan lindung nilai (*risk management*). Sarana lindung nilai ini tidak mungkin disediakan oleh satu bursa saja namun satu dengan yang lain jangan tumpang tindih misalnya kon-



Arifin Lumban Gaol

traknya sama.

Sebagai suatu industri yang baru (*infant*), dukungan dan bantuan pemerintah belum diperlukan. Di masa lalu, upaya stabilisasi harga komoditi, dilakukan pemerintah melalui pengaturan (intervensi) seperti tata-niaga, kuota, stok penyangga, perjanjian komoditi internasional. Dalam perjalanannya kebijakan ini kurang efektif, sering menimbulkan distorsi bahkan membutuhkan dana yang besar.

Dalam rangka mengefisienkan perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing produk-produk nasional, dan sejalan dengan masuknya Indonesia menjadi anggota WTO, kebijakan pengaturan tersebut dicabut atau dikurangi. Dengan dikurangnya kebijakan intervensi pasar tersebut, pemerintah tentu tidak membiarkan begitu saja risiko harga mengganggu kegiatan bisnis dunia usaha. Pemerintah wajib menyediakan sarana yang dapat digunakan dunia usaha untuk mengurangi risiko harga tersebut. Sarana atau instrument yang berdasarkan mekanisme pasar diantaranya perdagangan berjangka (*future trading*), opsi, swap, bond

Memang benar, dukungan lintas sektoral masih sangat lemah. Sebabnya adalah kurangnya pemahaman akan arti strategis industri perdagangan berjangka dalam perekonomian suatu negara. Di Brazil, dan beberapa negara di Amerika Latin, Bursa di samping untuk sarana lindung nilai dan tempat pembentukan harga, Bursa juga dimanfaatkan pemerintah dalam rangka pembelian barang-barang pemerintah (*procurement*) dan penyaluran subsidi. Mengingat arti strategis industri ini, pemerintah seyogianya menyusun master plan pengembangan industri perdagangan berjangka secara komprehensif sebagaimana dilakukan oleh banyak negara dengan melibatkan tenaga professional internasional di bidang perdagangan berjangka. ▲

Sejauh ini saya tidak dapat melihat dimana manfaat bursa berjangka. Karena di bursa yang ada tidak memperdagangkan kontrak berjangka komoditi. Apa yang diperdagangkan bursa saat ini bukanlah perdagangan berjangka karena tidak ada komoditinya. Itu hanya produk keuangan yang dimiliki oleh asing dan diperdagangkan dengan mekanisme pedagang berjangka.

Jadi itu bukan perdagangan berjangka komoditi. Kalau perdagangan berjangka komoditi, itu jelas kontrak komoditinya dan ditentukan melalui Keppres.

Dulu ada perdebatan mengapa kontrak komoditi harus ditetapkan melalui Keppres. Alasannya, agar pejabat yang mengawasi perdagangan berjangka tidak mudah 'bermain mata' dengan para pelaku pasar. Sebab bila itu terjadi maka dampaknya akan besar terhadap pergerakan harga, dan pada akhirnya akan merugikan berbagai pihak. Di sisi lain, pemerintah masih menganggap penting untuk mengontrol dan mengintervensi harga sejumlah komoditi, terutamanya komoditi pangan.

Oleh karena itu, dalam pengajuan kontrak berjangka komoditi sebenarnya tidak ada yang dipersulit. Sepanjang kita bisa mengajukan proposal dan memberi argumentasi yang cukup jelas. Hal ini sudah saya buktikan. Dimasa saya ada sejumlah komoditi yang diajukan ke presiden untuk memperoleh Keppres. Dan itu berhasil, sehingga sekarang ini ada sebanyak 22 kontrak berjangka komoditi yang sudah mendapatkan Keppres.

Kontrak berjangka produk keuangan pun saya coba untuk memperoleh Keppres. Tetapi ketika itu ada argumentasi lain dari Bank Indonesia. Deputi BI, Miranda Gulton, saat itu mengatakan, Kalau kontrak berjangka keuangan diperdagangkan di bursa berjangka, maka Bank Indonesia akan kesulitan mengawasi sektor moneter. Argumentasi itu memang benar, apa yang terjadi di Amerika beberapa waktu lalu dengan krisis financial adalah diakibatkan ulah para spekulan yang bermain di bursa berjangka.

Saya pikir Indonesia belum saatnya memasuki era itu, bursa memperdagangkan kontrak keuangan. Karena investor yang bermain harus memiliki modal besar dan itu hanya menguntungkan bagi kelompok mereka saja. Sedangkan masyarakat kita sebagian besar berbasis komoditi, dan mengandalkan komoditi untuk kehidupannya.

Kalau pun sekarang para pelaku pasar itu menghendaki kontrak berjangka produk keuangan, menurut saya diajukan saja ke persiden. Caranya, harus bisa meyakinkan menteri perdagangan dan menterinya pun bisa meyakinkan presiden.

Jadi tidak harus mengamendemen undang-undang, yang jelas memakan biaya dan waktu panjang.

Oleh karena itu saya dulu mengaktifkan dan membuat aturan penyaluran amanat ke bursa luar negeri (PALN). Itu



Ridwan Kurnaen

sesuai dan diatur oleh undang-undang, dan sampai saat ini PALN masih jalan. PALN itu pada dasarnya sama dengan perdagangan berjangka komoditi, investor bisa melakukan lindung nilai dan memperoleh referensi harga dari bursa luar negeri.

Okelah, saat ini sudah terlanjur perdagangan produk keuangan lebih dominant di bursa. Lalu bagaimana penanganannya? Ketika saya diminta pendapat soal itu, saya hanya bisa memberi saran, seperti buat satu sistem perdagangan yang bisa dikontrol Bappebti. Jangan sampai masing-masing pelaku pasar itu menggunakan sistem sendiri-sendiri, yang membuat tugas dan fungsi Bappebti tidak jalan. Selain itu, terapkan persyaratan yang ketat baik dari sisi keuangan maupun dari aturan perdagangan.

Jadi, kalau pun langkah-langkah pengamanan investor sudah dilakukan didalam perdagangan alternatif, bursa berjangka tidak boleh berhenti disitu. Bursa dan Bappebti harus terus kerja keras mengaktifkan kontrak berjangka komoditi. Soal kontrak berjangka komoditi gagal atau kurang diminati pelaku pasar itu soal lain. Itu artinya, kue yang dibikin kurang manis dan enak. ▲



Ardiansyah Parman

Semangat lahirnya UU No. 32/1997, punya keyakinan kalau negara produsen komoditi seperti Indonesia, negara itu akan punya bursa berjangka komoditi yang akan besar pula. Hal tersebut ada dalam latarbelakang undang-undang. Tetapi ternyata latarbelakang itu tidak pas secara keseluruhan. Contohnya Inggris, di London terdapat bursa kopi yang terbesar di dunia, tetapi Inggris bukan penghasil kopi. Jepang juga demikian, bursa komoditi yang ada di Tokyo justru besar dari perdagangan komoditi yang tidak dihasilkan di negara tersebut.

Memang ada negara produsen komoditi yang bisa mengembangkan bursa berjangka, seperti Malaysia. Tetapi kenyataannya, produsen CPO terbesar di dunia saat ini adalah Indonesia.

Hal inilah yang antara lain membuat para pelaku pasar perdagangan berjangka mencari saluran lain untuk bertransaksi. Maka keluarlah kebijakan sistem perdagangan alternatif. Waktu itu, yang terpenting bagi Bappebti adalah pengawasan. Karena perdagangan ini sangat dinamis.

Saya bukan ahli di bidang *futures trading* tetapi waktu itu saya piker ini tugas pemerintah untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang merugikan. Dan, hal ini pun pernah saya laporkan kepada Ibu Rini (Menperindag, Rini Suwandi).

Untuk membekali keluarnya kebijakan itu, sejumlah staf Bappebti saat itu harus ke Amerika mencari referensi dan literature. Tetapi ternyata di Amerika bisnis ini terpisah dari kontrak komoditi primer.

Sebenarnya, tujuan dari keluarnya kebijakan SPA bukan untuk menyelamatkan bursa. Melainkan pemerintah harus melindungi masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tanpa

aturan. Saya pun dulu banyak diingatkan, tetapi saya pikir, lebih baik pemerintah melindungi masyarakat. Kalau bursa mendapat manfaat dari kebijakan itu adalah dampak lain.

Jujur saja, ketika saya harus meninggalkan Bappebti karena ditugaskan di tempat lain, saya merasa meninggalkan bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Karena, sejak SPA diizinkan sesungguhnya masih banyak peraturan dan persyaratan yang harus dikeluarkan dan dipatuhi para pelaku pasar.

Saya cukup berterimakasih kepada Ibu Titi Hendrawati, karena beliau bisa menahan ledakan yang tidak diinginkan. Tetapi saya dengar saat ini Kepala Bappebti, Deddy Saleh, kembali menata para pelaku pasar. Mudah-mudahan semakin baik dan bisa memberi manfaat ekonomis.

Saya memang bukan ahilnya dibidang perdagangan berjangka, oleh karena itu saya mencoba mencari berbagai informasi dan pengalaman bagaimana mengerjakan bursa berjangka. Ada pendapat yang mengatakan, untuk mengerjakan bursa berjangka harus didukung pasar fisik *forward*. Dan memang benar, setelah saya pelajari dari perjalanan sejarah bursa berjangka diawali dari berkembangnya pasar fisik *forward*.

Maka kita mencoba merintis pasar fisik dengan bekerjasama dengan Dinas Indag Agro Jabar yang sudah melakukan pasar lelang. Akhirnya, pasar lelang Jabar itu dijadikan pilot projek dan menjadi acuan bagi daerah lain untuk mengembangkan pasar lelang. Tetapi belakangan ini saya kurang mengikuti perkembangan pasar lelang itu, dan sejauh mana manfaatnya bagi perkembangan bursa berjangka.

Untuk meningkatkan citra perdagangan berjangkan yang sudah terlanjur buruk saya pikir kita harus mendekati para pelakunya secara pribadi-pribadi. Dan disampaikan apa akibatnya kalau mereka tetap melakukan praktik yang bertentangan dengan peraturan. Tidak mesti setiap pelanggaran harus diterapkan peraturan yang ada. Karena terkadang pendekatan personal lebih efektif dibandingkan main peraturan.

Dulu, pernah saya dekati pemilik sebuah perusahaan yang *underground*. Saya ajak bicara baik-baik, dan dia mau berubah. Malah perusahaan itu menerapkan SOP lebih dulu dibandingkan perusahaan lain.

Tetapi saya yakin 'kok, suatu saat nantinya perdagangan berjangka akan eksis di Indonesia. Memang perlu waktu, di Amerika saja bursa berjangka butuh puluhan tahun hingga bisa seperti sekarang ini. Bahkan ada bursa yang tutup karena kontrak komoditinya tidak likuid dan ada juga yang merger.

Idealnya bursa berjangka di Indonesia bisa maju, karena kita negara produsen. Tetapi kita tidak bisa memaksa, karena mekanisme pasarlah yang menentukan. Oleh karena itu, untuk mempengaruhi mekanisme pasar tadi, dua kekuatan antara pemerintah dan dunia usaha harus saling bersinergi mengembangkan perdagangan berjangka. ▲

Ketika saya diberi tugas menjabat Kepala Bappebti, ternyata saya mendapatkan 'warisan' tugas yang sangat berat. Apalagi saat itu saya sudah sekitar 10 tahun tidak bersinggungan dengan perdagangan berjangka, karena sebelumnya saya menjadi atase perdagangan di Jerman dan posisi lain. Jadi tidak mengikuti perkembangan perdagangan berjangka.

Tetapi karena saya termasuk salah satu tim 11 yang ikut merancang lahirnya UU No. 32/1997, saya bisa lebih cepat beradaptasi dengan industri ini. Dan apa yang saya lihat, kondisinya saat itu sangat tidak sehat. Apa yang dilakukan para pelaku pasar sangat bertentangan dengan tujuan undang-undang.

Saya mencoba melapor, menjelaskan hal itu kepada Menteri Perdagangan, dan saya diminta untuk mengambil langkah-langkah yang dapat memperbaiki kondisi itu ke arah yang benar.

Oleh karena itu, dalam jangka pendek strategi saya mencoba mempersempit ruang gerak para pelaku pasar untuk tidak merugikan masyarakat. Makanya ketika itu saya langsung memutuskan untuk mencabut perdagangan kontrak mini. Dan dilanjutkan penyempurnaan peraturan yang ada.

Tetapi pada prinsipnya, dihati kecil saya tidak ingin ada praktik perdagangan yang seperti itu. Karena tidak ada manfaatnya secara ekonomis yang dapat dinikmati masyarakat terutama petani. Padahal kita sudah banyak menghabiskan uang negara yang juga berasal dari rakyat, untuk menyusun undang-undang. Lah, ketika undang-undangnya sudah ada, kok, rakyat tidak dapat menikmatinya?

Di Amerika, perdagangan berjangka di luar bursa peraturannya sangat ketat. Siapa yang ketahuan melakukan malpraktik perdagangan berjangka, hukumannya akan berat. Bayangkan, di dalam undang-undang perdagangan berjangka Amerika, ada pasal yang bisa menghukum terdakwa hingga 150 tahun.

Itu artinya apa? Bahwa pemerintah Amerika menganggap praktik spekulasi seperti itu bisa mengganggu dan membahayakan perekonomian. Kalau sudah mengganggu perekonomian berarti mengganggu kepentingan nasional dan merugikan masyarakat.

Jadi, ketika terdakwa itu sudah meninggal, di liang kubur pun tetap saja statusnya narapidana.



Titi Hendrawati

Beda dengan hukuman seumur hidup. Ketika dia sudah meninggal, statusnya pun berubah bebas.

Ke depan, saya melihat tugas dan tanggungjawab BAPPEBTI sangat berat. Terutama dalam mengawasi perdagangan di luar bursa. Demikian juga dalam menyusun peraturan, apalagi perdagangan di luar bursa ini dimasukkan dalam undang-undang yang akan diamandemen. Dalam falsafah Islam, ada kalimat yang mengatakan, "serahkan tugas kepada ahlinya, kalau tidak, maka tunggu kehancurannya". Yang saya maksudkan dalam serahkan kepada ahlinya, bukan berarti yang menjalankan ini wajib orang yang ahli. Tetapi tenaga ahli itu kan bisa siapa saja. Bisa sewa tenaga ahli dari luar, lalu kita yang mememanajemen. Tetapi jangan diserahkan kepada konsultan yang datang dan pergi begitu saja.

Kalau boleh saya saran, jika perdagangan di luar bursa dimasukkan dalam amandemen UU No. 32/1997, harus diatur secara detail. Dan sanksi hukum yang diberlakukan harus seberat-beratnya, sehingga ada ketakutan untuk tidak merugikan orang lain. ▲

BKDI 'Geber' Komoditi Primer

Bappebti mengeluarkan izin usaha bagi BKDI dan ISI, dua pihak ini berkomitmen untuk fokus terhadap perdagangan berjangka kontrak komoditi primer. Diperkirakan *launching* perdagangan perdana digelar paling lambat Oktober 2009. Selain memacu dinamika persaingan usaha, diharapkan para kompetitor ini juga mampu mendongkrak perkembangan industri perdagangan berjangka di tanah air.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memberikan izin usaha pelaku pasar kepada PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) dan PT Identrust Security International (ISI), pada Selasa, 7 Juli 2009 di Graha Finance, Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 26/BAPPEBTI/KP/6/2009 tanggal 23 Juni 2009 kepada BKDI sebagai bursa berjangka dan Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 30/BAPPEBTI/KP/7/2009 tanggal 3 Juli 2009 kepada ISI sebagai lembaga kliring berjangka. Pemberian izin usaha tersebut diserahkan Kepala Bappebti Deddy Saleh, kepada Dirut BKDI, Megain Widjaya dan Dirut ISI, Ferry A Sangeroki.

Dalam jajaran kepengurusan BKDI atau juga dikenal dengan *Indonesia Commodity and Derivative Exchange* (ICDX), selain Megain Wijaya, terdapat nama Arwadi J Setiabudi sebagai Direktur, sementara di jajaran Dewan Komisaris ada nama-nama familiar dalam dunia bisnis seperti Fenny Widjaya (Komisaris Utama), Diby Widodo, Hasanudin Massaile dan Reymond Laksmanadi Kristiadi. Sedangkan ISI, selain Ferry A Sangeroki juga terdapat Nursalam dan Didiek Tricahyo sebagai Direktur, sementara Komisaris Utama dijabat I Gede Artjana. Dalam operasionalnya nanti, BKDI dan ISI akan berkantor bersebelahan di Jalan Letjen S Parman Kavling 73 Jakarta.

Wacana munculnya para kompetitor di dunia industri perdagangan berjangka tanah air ini memang sudah cukup lama menggelembung. Pro dan kontra atas rencana kehadiran "pendatang" baru ini pun merebak tajam. Dapat dimaklumi, industri perdagangan berjangka di Indonesia memang belum berkembang sempurna. PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT Kliring Berjangka Indonesia (BKDI) saja masih belum

kokoh menapakkan kakinya. Ketika kemudian tiba-tiba dipastikan akan datang pesaing baru, maka wajar jika banyak yang meragukan keberhasilannya. Tetapi tidak sedikit pihak yang justru merespon positif kehadiran kelompok swasta ini. Karena bukan tidak mungkin, dari persaingan sehat yang tercipta justru dapat meniupkan energi positif bagi pengembangan industri perdagangan berjangka.

Pemain Global

Jika melirik perkembangan bursa berjangka komoditi di sejumlah negara seperti China, India, Malaysia dan Singapura, memang masing-masing memiliki lebih dari satu bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka. Hal ini terjadi karena selain untuk melakukan lindung nilai dan investasi bagi para pelaku usaha, juga karena banyaknya pilihan jenis produk kontrak berjangka yang dapat diperdagangkan. Sehingga kehadiran BKDI dan ISI ini diharapkan nantinya dapat menjadi pilihan bagi para pelaku usaha untuk melakukan lindung nilai, alternative investasi dan mendapatkan referensi harga yang memang sangat dibutuhkan dalam upaya mendongkrak daya saing di pasar global. Artinya memang tidak hanya sekedar sukses "menelurkan" referensi harga di "kandang", tetapi juga mampu "menetaskan" persaingan sebagai salah satu barometer acuan harga internasional.

Menurut Kepala Bappebti Deddy Saleh, BKDI dan ISI bukan merupakan kandidat akhir dalam persaingan di dunia bisnis perdagangan berjangka. Justru Bappebti masih membuka "keran" bagi pesaing baru-baru yang diharapkan akan segera bermunculan. Dan Bappebti pun akan bersedia memberikan izin usaha kepada pihak-pihak tersebut, sejauh komitmen pengembangannya bermuara antara lain pada referensi harga, hedging dan bermanfaat ke petani dalam hal ini dilihat dari

indikatorya. Dari masa awal setelah beberapa tahun berdiri BBJ, sebenarnya juga sudah terbuka peluang bagi siapa pun yang ingin mendirikan bursa. Hanya saja sekarang ini Deddy menilai bahwa memang sudah ada kebutuhan mendesak untuk segera menghadirkan bursa baru. Meski dia mengakui, tugas bursa baru ini juga ringan-ringan berat, terutama untuk pembentukan

Fokus Komoditi

Sementara itu, Dirut BKDI Megain Wijaya mengatakan, target yang akan diuraikan selanjutnya akan seiring dengan pertumbuhan *membership*. Dimana pihaknya akan melibatkan *stakeholder*, termasuk pemain-pemain yang tidak masuk dalam bursa. Saat ini tercatat sudah ada kurang lebih sekitar 11 perusahaan



referensi harga, lindung nilai dan eksportir yang selama ini belum terjadi, contohnya pada olein.

Adanya persaingan ini nantinya dipastikannya justru akan memacu hal positif. Apalagi komitmen BKDI akan fokus ke komoditi primer. Dan Bappebti sendiri juga sudah mencoba untuk membuat aturan infrastruktur demi melindungi nasabah, seperti mendirikan BAKTI, dan mengangkat Direktur Kepatuhan. Namun demikian, Deddy optimis BKDI dan ISI akan sukses berkembang dalam dua tahun ke depan. Malah jika mereka benar-benar konsisten terhadap komitmen yang telah dicanangkan, bukan tidak mungkin tanda-tanda perkembangan itu sudah terlihat pada periode satu tahun saja.

"Saya akan memaksa BKDI untuk segera beroperasi sekitar September atau Oktober ini. Kita tunggu *grand launching*nya saja. Pasti nanti besar-besaran, ya. Mengundang pejabat, dan juga artis-artis yang sedang ngetop, entah itu Manohara atau siapalah!. Pokoknya akan diselenggarakan lebih dari sekarang (acara penyerahan izin usaha)," seloroh Deddy Saleh dengan gaya khasnya.

yang akan menjadi anggota BKDI. Dia pun kembali menegaskan fokus BKDI dan ISI untuk "setia" di komoditi primer. Sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai negara acuan harga komoditi internasional.

"Kami tidak akan ke *forex* dan *index*. Karena fokus kami memang ke komoditi. Dan kami akan terus melakukan sosialisasi sampai ke level terbawah. Karena komitmen kami sampai tercipta referensi harga. Tetapi fokus kami terlebih dulu kepada *membership*. Kalau belum dapat *member*, tentu tidak dapat *trading*. Kami akan segera memulai *trading*. Tunggu tanggal mainnya saja. Member kami bergerak di komoditi emas. Ke depan akan ada inovasi produk, tetapi fokus tetap *futures*. Mengenai kapan mulai *trading*, jika Pak Deddy (Kepala Bappebti Deddy Saleh) bilang September, ya, kita usahakan September!" tegas Megain Wijaya.

Dirut ISI, Ferry A Sangeroki pun mengungkapkan kesiapan pihaknya mengenai sistem antar bursa dan kliring yang *integrated*. Dia juga menjelaskan jika setiap anggota kliring adalah anggota bursa. Tetapi tidak kemudian otomatis semua menjadi anggota kliring. ▲

Bursa Komoditi Lebih Keren dari Bursa Saham

Dirut ICDX, Megain Widjaja, ditemui pada 17 Juli 2009, di Gedung ICDX Jalan S Parman Kav. 73 Jakarta Barat dan didampingi Direktur ICDX, Arwadi J Setiabudi, serta Direktur ISI, Nursalam, menuturkan berbagai hal mulai dari masa persiapan hingga memperoleh izin usaha dari Bappebti. Dan, rencana perdagangan perdana pada Oktober 2009 nanti. Meski hari itu bertepatan dengan aksi peledakan bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton, suasana perbincangan tetap hangat dan menarik. Berikut ini hasil wawancara yang sudah disarikan redaksi.

Apa motivasi dibalik berdirinya ICDX?

Menurut saya, Indonesia merupakan negara yang diberkati dengan begitu banyak komoditi. Produsen *need produce management*, ICDX dilahirkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Amerika, European, 'kok bisa maju dalam mengembangkan bursa berjangka komoditi? Sebut saja CBOT, CME, LIFFE dan lain-lain, mereka bisa karena ada *underlying* yang kuat. London tidak ada komoditi, tapi mereka bisa memasarkan berbagai macam komoditi yang diproduksi Indonesia. Misalnya coklat, gula, kopi. *Something wrong! We are the sleepy giant.*

Setelah kami melakukan berbagai studi dan sebagainya, ternyata bursa sangat dibutuhkan di Indonesia. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) menurut saya belum gagal. Kita akan fokus ke kontrak komoditi. Saya tidak bisa membandingkan ya antara BBJ dan ICDX. Sebab bisa jadi *polemic*.

Negara ini *underlying*-nya melimpah, kalau kita tidak punya mekanisme ekonomi, bursa *nggak* jalan. Lalu, apakah kita lebih bodoh? Tidak! Dua tahun jerih payah kami mendirikan ICDX ini. Didukung 4

(empat) organisasi dan 11 (sebelas) *company*, sejak bulan Oktober 2007, sudah melakukan berbagai kegiatan dan program untuk tercapainya tujuan ICDX.

Mungkin untuk kondisi bisnis perdagangan berjangka di tanah air saat ini sedikit sulit. Bahkan ada orang yang meragukan untuk pendirian bursa baru. Paling tidak orang akan berpikir, *ha...? Bikin bursa!!!*

Memang tidak segampang yang kita pikir. Kami berterima kasih kepada Bappebti yang telah memberikan izin dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Kalau boleh tahu, berapa besar dana yang dipersiapkan untuk pendirian ICDX?

Budget pendirian ICDX diperkirakan sebesar Rp 100 miliar. Tetapi, kita harapkan dana itu tidak sampai habis namun sudah bisa mandiri.

Artinya target break event point pada tahun keberapa?

BEP (*break event point*), lebih cepat lebih baik, inginnya. Tetapi kami *nggak* mau muluk-muluk dulu. Kita sudah banyak pengorbanan. Makanya, saya sudah minta dari pelaku pasar, Bappebti, dan instansi untuk membantu ICDX. Karena kalau mereka mau membantu ICDX, mereka bukan membantu kami semata, tetapi membantu Indonesia. Karena Indonesia akan mendapatkan harkat dan martabatnya lagi sebagai bangsa. Kami berupaya agar semua bisa membantu termasuk lintas departemen.

Tentu mereka nantinya akan



bertanya. Kenapa saya harus bantu anda? Tetapi akan saya jelaskan secara rinci dan gamblang. Kita semua disini *open discussion*. *We are open policy*. *We want even to be friend*. Jadi jika *approach* untuk ke pihak pemerintah, tentu '*barrier*'-nya juga *nggak* ada. Kita ada *good will*. Jadi sangat butuh bantuan dari departemen terkait. (*we are having any other*). Prinsipnya, *networking*. Kita adalah *public servant* abdi pada negara. Kita juga minta tolonglah ke teman-teman di pemerintahan.

Kita sama-sama butuh kok. Tapi, *just help!* Indonesia sampai bisa begini karena orang-orang yang ada dalam departemen itu.

Dengan berdirinya ICDX perdagangan berjangka akan semakin populer, apa tanggapannya?

Di Indonesia kayaknya main saham itu *keren* banget. Pada hal di luar negeri kebalik!. Bursa komoditi yang malah lebih diminati. Ini artinya persepsi. Nah, ini apa artinya kita tinggal diam begitu saja? Kita harus ubah paradigma. Kita mesti dobrak juga, kita harus beri penjelasan keberbagai instansi pemerintah. Ini ada perdagangan berjangka komoditi yang bisa berkontribusi kepada negara dan sebagainya. Kalau kita hanya diam saja. Ya, *nggak* bisa!

Bagaimana menjadi anggota ICDX?

Kalau mengenai persyaratan sebagai anggota ICDX, saya inginkan urusan *application* yang simple-simple saja. Jangan kayak mau *ngisi* formulir yang bertumpuk dan panjang-panjang bergitu. Dalam aplikasi isi formulir cukup sederhana. *Simple*, tapi lampirannya banyak. Lampiran 'kan paling tinggal fotokopi. Begitu semua masuk, baru kemudian ajukan ke komite *membership*. Baru kemudian nanti diajukan kepada pihak direksi untuk diputuskan diterima

menjadi anggota atau tidak. Kita targetkan segenap lapisan pelaku pasar undang masuk ke ICDX. Mau pengusaha kelas kakap, sampai *small deep enterprises* atau petani pun kita undang. Sekarang tugas kita bersama pemerintah dan media untuk memberikan sosialisasi dan edukasi.

Apakah ada klasifikasi keanggotaan ICDX?

Di bursa berjangka yang sudah ada, banyak jenis membership yang belum diaktifkan. Misalnya penasihat berjangka dan sentra dana berjangka. Saya juga bertanya, kenapa di Indonesia belum ada reksadana yang berbasis komoditi? Ke depan, jika ICDX beroperasi, saya ingin *introduce* ke teman-teman yang kerjanya *hedge fund*. *Ayo, invest* atau *trade in my bursa!* Dengan adanya seperti ini, likuiditas kita *tokcer* punya! Kita perlu itu juga, pemain asing! Kenapa di bursa saham boleh, 'kok di bursa berjangka tidak? Kemungkinan ada *miscom* (miss communication). Kenapa ini boleh asing, terus pembeli *futures* *nggak* boleh asing?

Berapa besar biaya satu seet keanggotaan ICDX?

Seet itu 'kan *very much indential with floor trading*. Sedangkan kita sudah *on-line*. *Basicly* hanya *membership* keanggotaan. Masalah *fee* untuk proses *membership* kita buat murah meriah. Yang penting, semua bisa masuk ke ICDX. Perusahaan pialang dikenakan biaya *processing fee* sebesar Rp 1 juta. Keanggotaan pialang sebesar Rp 100 juta dan dikenakan biaya Rp 2 juta per bulan. Sementara dana kompensasi sebesar Rp 100 juta.

Kalau untuk pedagang, terbagi dua yakni pedagang perorangan dan perusahaan pedagang. Keanggotaan pedagang perorangan sebesar Rp 25 juta. Kita buat *very attractive*. Sedangkan biaya perdagangan perbulan sebesar Rp 1 juta, dengan *processing fee* juga sama Rp 1 juta.

Megain Widjaja; * kelahiran Surabaya, Jatim, 30 Desember 1981. * Pendidikan Finance and Accounting dari Seattle University, lulus dengan predikat *summa cum laude*. * Karier, Assistant Portofolio Manager di R.A Bench Wealth Management, Seattle, US., Managing Partner Focus Media, Jakarta.

Bagaimana kesiapan sistem perdagangan dan berasal dari negara mana?

Sistem perdagangan yang akan kita gunakan *PAT SYSTEM* dari United Kingdom. Sistem ini sudah dipakai dibanyak negara, seperti Thailand, China, Jepang dan Pakistan.

Mengapa hanya kontrak berjangka CPO dan Gold yang dipersiapkan?

Kenapa cuma dua, CPO dan gold? Kita sebenarnya mau merangkul sebanyak-banyaknya. Tapi kita 'kan bicara waktu? Kalau kita ingin semua, kapan bursa ini akan mulai? Kita juga bilang ke *consultant*, kita siapkan ini dulu. Baru yang lain di *introduce*. Kenapa juga kita pilih gold dan CPO? Kalau BBJ ada fisik, kita ada *futures*. Lalu kenapa gold? Gold itu adalah *global fresh commodity*.

Segmen investor mana saja yang dibidik untuk dua kontrak tersebut?

Gold lebih mengarah ke *futures focus*. Sedangkan untuk kontrak CPO diarahkan kepada institusional.

Apakah sudah terpikirkan atau direncanakan kontrak komoditi yang akan dikembangkan selain CPO dan Gold?

Next things, kontrak komoditi batubara, timah dan kakao. Komoditi kopi mungkin, tapi kita harus *study* lagi. Kopi Indonesia sudah kalah dengan Vietnam. Padahal dulu Indonesia lebih baik, tetapi dalam waktu 5 tahun disalib Vietnam. ▲

Ferry Sangeroki

ISI Siap Jadi 'Atlet Marathon'

Sebuah bisnis kepercayaan seperti lembaga kliring berjangka tidak saja dibutuhkan modal yang besar. Melainkan, karakter dan kapabilitas pun harus mendukung. PT Identrust Security International (ISI), yang memperoleh izin sebagai lembaga kliring berjangka dari Bappebti, pada 7 Juli 2009, lalu, memiliki strategi tersendiri dalam mengembangkan industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air.



Menjadi salah satu pilar diindustri perdagangan berjangka komoditi di tanah air, PT Identrust Security International (ISI) telah menyusun sebuah *roadmap* yang tergolong matang untuk jangka panjang. Setidaknya hal itu tampak dari kriteria calon anggota kliring yang akan direkrut ISI dari anggota bursa Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX). Ada tiga syarat yang harus dipenuhi calon anggota kliring ISI, yakni *character*, *capital* dan *capability*. Atau dikenal dengan 3 C. Salah satu dari syarat itu tidak bisa dipenuhi calon anggota kliring, maka gugurlah harapannya menjadi anggota kliring.

Mengapa persyaratan itu demikian ketat diterapkan ISI? Dirut ISI, Ferry Sangeroki, dengan singkat mengatakan, bisnis ini adalah bisnis kepercayaan. Ketiga hal itu harus sinkron satu sama lain, kalau sudah ada tiga hal itu bisa dipenuhi maka persyaratan lainnya dari kita gampang.

"3C ini sangat penting dalam bisnis kepercayaan seperti ini. *Character*-nya harus baik, *Capital*-nya pun harus cukup seperti yang kita inginkan. Dan, *Capability*-nya pun ada. Kita mau yang utuh dari 3C itu. Tidak bisa misalnya perusahaan ini punya modal dan kapabilitasnya pun oke, tetapi orang-orang di dalamnya diketahui sering bermasalah dan merugikan orang lain. Atau bisa juga misalnya, orang-orang di perusahaan tersebut dijamin kebaikannya karena yang mengisi di jajaran direksi rata-rata ustad, pendeta dan para

tokoh agama lainnya, tapi mereka tidak punya modal. Itu akan percuma," jelas Ferry.

Melihat persyaratan yang demikian ketat ditetapkan ISI, apakah ada pihak yang tertarik dengan bisnis ini? Dengan tegas dijawab Ferry Sangeroki, saat ini pun sudah ada sebanyak 15 calon member kliring.

"Tetapi menurut saya, jumlah anggota sedikit atau banyak bukanlah masalah. Yang penting volume transaksinya, jika kita punya 50 member tetapi tiap hari hanya trading 1.000 lot, akan lebih mendingan punya 10 anggota tetapi tiap hari bisa trading 2.000 lot. Lebih penting kualitas bukan kuantitas. Berapa lot yang bisa dia trading-kan tiap hari. Prinsip kita, 20 persen member, 80 persen *review*," kata Ferry.

Dan, sekali lagi pun ditegaskannya, "tidak sulit mencari 15 member di Indonesia. *I don't think so*." Bahkan, menurut Ferry, bila ada pihak dari luar negeri yang tertarik menjadi anggota ISI pintu terbuka lebar. "Saya kira tidak ada masalah siapa pun dia dan dari mana asalnya, yang penting memenuhi syarat 3C tadi. Saya bukannya *neolib*, tapi dengan arus globalisasi seperti sekarang ini seharusnya tidak dibatasi pihak asing masuk dalam bisnis ini," papar Ferry.

Bicara soal target dan kekuatan ISI memasuki bisnis perdagangan berjangka, Ferry Sangeroki, tak muluk-muluk mengumbar janji didepan. Dia pun memiliki jawaban yang cukup diplomatis, "dalam hitungan saya, lima tahun kedepan ISI masih bisa bertahan. Bahkan, apabila pun ada guncangan ekonomi di Indonesia, ISI tetap bisa bertahan. Kita memiliki ketahanan berlapis-lapis, mulai dari dana kliring, margin, security deposit, kliring fund dan insured equity. Hal itu sudah kita persiapkan, suatu bisnis harus ada prediksi jangka panjang."

"Hal itulah yang membuat baik pemain lokal maupun internasional melihat institusi ini dapat dipercaya. Tetapi ini memang tidak bisa dilakukan dengan gerakan satu atau dua pukul saja. Kalau mau bicara, seperti olahraga lari, kita bukan atlet *sprinter* melainkan atlet *marathon*. Jadi perlu untuk menjaga stamina demi menuju ke garis *finish*. Sehingga nama besar yang dipertaruhkan tidak pupus di jalan," imbuh Ferry Sangeroki. ▲

Syarat anggota ISI: Merupakan anggota bursa ICDX, menyerahkan dana processing fee sebesar Rp 1 juta. Menyerahkan dana membership fee (untuk perusahaan pialang dan pedagang) sebesar Rp 250 juta. Iuran bulanan untuk perusahaan pialang dan pedagang masing-masing Rp 1 juta. Security Deposit untuk perusahaan pialang sebesar Rp 5 miliar dan untuk pedagang Rp 1 miliar.

Agungkan Kepercayaan Tinggi

Berharap eksis menerobos bisnis perdagangan berjangka komoditi, PT Identrust Security International (ISI), menggantungkan image kepercayaan publik setinggi-tingginya. Oleh karena itu, pilihan nama perusahaan ini pun diidentikan dengan kata trust. Mengorek lebih jauh tentang ISI, redaksi pun menemui Dirut ISI, Ferry Sangeroki, di ruang kerjanya. Berikut intisari dari perbincangan kami.



Siapa saja dibalik berdirinya ISI?

Pemegang saham ISI 100 persen Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX). Tak ada satu pun pemegang saham dari pihak lain.

Bisa dijelaskan mengapa memilih nama PT Identrust Security International?

Kami memberikan nama perusahaan ini PT Identrust Security International, karena kami menyadari bahwa bisnis ini sifatnya butuh kepercayaan yang tinggi. Identity kami adalah kepercayaan. Dan visi kami bukan hanya kembangkan bisnis ini untuk komunitas Indonesia, melainkan juga komunitas internasional. Komoditas Indonesia yang surplus itu seharusnya bisa diminati dan dibeli pasar internasional. Jadi, artinya, suatu brand bisa kuat kalau kita punya identitas atau program yang jelas.

Visi-misi kita harus tercermin ke arah mana kita akan tempuh, tetapi yang terpenting bagaimana kita deliver bisnis ini. ISI adalah penunjang, sedangkan bursa (ICDX) yang akan melakukan inovasi produk. Kita punya roadmap yang cukup jelas dengan anggota kita. Anggota ISI adalah anggota bursa, tetapi tidak semua anggota bursa menjadi anggota ISI. Semakin banyak bursa berinovasi, tentunya client ISI semakin banyak pula dan tentu akan semakin sibuk.

ISI akan memberikan nilai tambah kepada anggota bursa, tetapi yang kita mau client ISI bukan melulu orang-

► Laporan UTAMA ◀

orang yang melakukan spekulasi. *More than that!* Bukan hanya kepada orang yang punya duit, nongkrong *buy-sell, buy-sell*. Lebih dari itu ya, karenanya kita akan melakukan *service excellent*.

Image buruk perdagangan berjangka saat ini sangat terasa, bagaimana ISI menyikapinya?

Buat saya *image created by design*, dengan roadmap yang bagus mungkin baru 3 tahun sama dengan Malaysia, dan 5 tahun sejajar dengan Eropa. Tapi itu tentu bukan mimpi semalam, *image* itu harus di *build*. *Trust! Image have to be build. And now, we are doing this things*.

Kita punya program, sistem yang baik, karyawan *educated*. Unsur-unsur itu harusnya ada dalam perusahaan. Saya malah sebenarnya *simple*, bukan dalam posisi pembanding karena kita juga belum *performance*. Apa yang kita pelajari bukan dari kegagalan saja, tetapi juga dari keberhasilannya. Bukan dari tetangga dekat saja, tetapi juga tetangga jauh. Banyak factor, jadi jangan menyalahkan saja kita harus *holistic*.

Beroperasinya dua bursa dan dua kliring, mau tidak mau akan berkompetisi, apa tanggapannya?

Yang saya tahu dengan adanya ISI, kita bisa bersinergi untuk membangun bisnis perdagangan berjangka di Indonesia. Nantinya, dalam memilih *client* kita akan mencoba menarik orang-orang yang selama ini trading ke bursa luar negeri dan untuk *trading* di ICDX. Kalau kita hanya mengandalkan *market* lama, bisa habis kita. Jadi kita harus meng-*created market*. Tidak bisa juga jika kemudian ada pemikiran bahwa yang baru ini akan mematikan yang telah ada. Indonesia sangat besar untuk bisnis yang sangat kecil seperti ini. Kalau saya melihat, *key success factor* bukan hanya dari perusahaan tetapi juga dari *human resources, or system* yang ada. Dengan *trading system* yang bagus, *we use integrated trading system*, dengan *public relation programs* yang bagus serta hubungan kerjasama ke luar yang bagus, dan lain-lain itu yang harus dibutuhkan kliring dan bursa untuk tetap eksis di industri ini.

Rencananya delivery Gold dan CPO akan dilakukan dimana dan tangki milik siapa?

Delivery CPO akan dilakukan di pelabuhan Belawan dan Dumai. Kita pun sudah melakukan studi terhadap tangki-tangki yang akan digunakan. Dan untuk tahap awal, tangki yang digunakan adalah tangki semua produsen yang telah terdaftar di bursa. Sedangkan untuk gold rencananya kita akan kerjasama dengan Perum. Pegadaian. ▲

Ferry A Sangeroki; * Lahir, Manado, 8 Agustus 1963. * Pendidikan, S1 Iowa State University, Major MIS. Master of Bussiness Administrasion from Golden Gate University, Post Graduate Certify UC Berkeley, Major Corporate finance. * Istri: Fransisca. Anak-anak: Claudio Sangeroki (10) dan Calista Bianca Sangeroki (5). * Hobi: sport, golf, tennis dan baca novel. * Pengalaman karir; Foreign Exchange Company, BII, CEO Vigers International, Ciputra Surya, Entrepreneur.

► **Agenda FOTO** ◀



Bappebti menyerahkan izin usaha bursa berjangka kepada PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), dan izin usaha lembaga kliring berjangka kepada PT. Identrust Security International (ISI), 7 Juli 2009. ▲



Kepala Bappebti yang diwakili oleh Kepala Biro Perniagaan, Made Soekarwo, menyerahkan persetujuan kepada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. sebagai bank penyimpan margin, persetujuan itu diterima Direktur Korporasi BNI, Khrisna Suparto, 14 Juli 2009. ▲



Kepala Bappebti, Deddy Saleh memberi sambutan pada pembekalan sebanyak 57 Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka. Di ujung acara Kepala Biro Hukum Bappebti Alfons Samosir menyerahkan sertifikat direktur kepatuhan, Bandung-Jabar, 10-11 Juli 2009. ▲



Bappebti menyelenggarakan koordinasi dengan aparat penegak hukum di Solo-Jateng. Usai acara Kepala Bappebti memberi keterangan pers, 16 Juli 2009. ▲

Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa Bappebti, Sutriono Edi, menjadi salah satu nara sumber pada Pelatihan Sistem Resi Gudang untuk pelaku usaha, Jakarta, 23 Juli 2009. ▲





Nanas Buah Tropis

Siapa sih nggak suka nanas? Buah bertunas dengan rasa asam manis segar yang khas. Mungkin cuma wanita yang sedang mengandung saja yang menjauhi buah ini. Karena nanas banyak disukai untuk dinikmati dalam jenis produk apa pun. Mulai dari minuman, selai, masakan gulai, pindang, manisan sampai rujak. Pokoknya enak! Tetapi jangan lupa, nanas sejak dulu juga dikenal sebagai bahan untuk pengobatan penyakit dan merawat kecantikan.

Sebenarnya, nanas bukan merupakan buah asli Indonesia melainkan dari negara tropis lainnya yaitu Brazil. Sama seperti di tanah air, buah nanas di negara-negara Amerika Latin juga sangat digemari. Tanaman ini bukan hanya jadi konsumsi lokal, tetapi juga digiring untuk ekspor. Di Indonesia, meski banyak perkebunan nanas tetapi masyarakat juga menanamnya di pekarangan rumah atau dipinggir jalan. Bukan hanya sebagai buah yang siap untuk dinikmati, tetapi juga wujud unik pohon nanas dapat juga menjadi hiasan taman yang indah. Apalagi nanas dapat tumbuh sepanjang tahun, dengan masa panen antara dua sampai tiga kali. Sehingga wajar jika tanaman ini menjadi salah satu komoditi yang tidak sulit untuk dijumpai.

Di nusantara, kita mengenal banyak sebutan untuk nanas. Mulai dari ekahauku (Enggano), anes (Aceh), nas (Gayo), henas, kenas,





Nan Manis

hanas, hanas (Batak), gona (Nias), asit, nasit (Mentawai), enas, kanas, nanas (Melayu), aneh, naneh (Minangkabau), kanas, kanyas, nas, nyanyas (Lampung). Jawa: danas, ganas (Sunda), nanas (Jawa); lanas, nanas (Madura): Kalimantan: kanas, samblaka, malaka, uro usan, kayu usan, kayu ujan, belasan. Nusa Tenggara: manas (Bali), nanas (Sasak), aruma, fanda, pandal (Bima), panda (Sumba), nana (Sawu), peda, anana, pedang (Flores), parangena, nanasi (Taluud). Sulawesi: tuis mangandow, na'asi, nanasi, tuis, tuis ne walanda, busa, pinang (Ut. Alf.), nanati (Gorontalo), lalato (Buol), nanasi (Toraja), pandang (Makasar, Bugis), edan, ekam, hedan (Timor). esne (Kisar), ngewu (Tanimbar). Maluku: ai nasi, than baba-ba, kai nasi (Seram Timur), bangkalo, kampora, kanasoi (Seram Barat), anasu, banggala, bangkala, kai nasu, kambala, kampala (Seram selatan), arnasinu, kanasi, kurnasin, mangala, nanasi (Amb.Alf.), nanasu, anasul (Ulias). Irian Jaya: Manimap, miniap. Beragamnya nama untuk nanas ini membuktikan bahwa hampir semua masyarakat lokal mengenal dan wilayahnya menanam buah ini. Apalagi nanas merupakan tanaman buah yang selalu tersedia sepanjang tahun.

Nanas merupakan herba tahunan atau dua tahunan, tinggi 50-150 cm, terdapat tunas merayap pada bagian pangkalnya. Daun

berkumpul dalam roset akar dan pada bagian pangkalnya melebar menjadi pelepah. Helaian daun bentuk pedang, tebal, liat, panjang 80-120 cm, lebar 2-6 cm, ujung lancip menyerupai duri, tepi berduri tempel yang membengkok ke atas, sisi bawah bersisik putih, berwarna hijau atau hijau kemerahan. Bunga majemuk tersusun dalam bulir yang sangat rapat, letaknya terminal dan bertangkai panjang. Buahnya buah buni majemuk, bulat panjang, berdaging, berwarna hijau, jika masak warnanya menjadi kuning.

Khasiat Buah dan Daun Nanas

Nanas dikenal bukan hanya untuk dimakan, tetapi untuk proses pengobatan terutama penggunaan pada bagian buah dan daun. Sifat dan Khasiat Buah masak sifatnya dingin, berkhasiat mengurangi keluarnya asam lambung yang berlebihan, membantu mencernakan makanan di lambung, antiradang, peluruh kencing (diuretik), membersihkan jaringan kulit yang mati (skin debridement), mengganggu pertumbuhan set kanker, menghambat penggumpalan trombosit (agregasi platelet), dan mempunyai aktifitas fibrinolitik. Buah muda rasanya asam, berkhasiat memacu enzim pencernaan, antelmintik, diuretik, peluruh haid (emenagog), abortivum, peluruh dahak (mukolitik), dan pencahar. Daun berkhasiat antipiretik, antelmintik, pencahar, antiradang, dan menormalkan siklus haid.

Ternyata, enzim yang terkandung dalam buah nanas juga berkhasiat debridement yang cepat (percobaan dilakukan pada tikus yang mengalami luka bakar). Pemberian ekstrak nanas muda



sebanyak 0,2 ml pada mencit hamil dapat mematikan embrio mencit jika diberikan pada umur kehamilan 2 dan 4 hari. Jika diberikan pada umur kehamilan 6 hari, kehamilan tetap berlangsung dan dapat melahirkan normal. Buah mengandung vitamin (A dan C), kalsium, fosfor, magnesium, besi, natrium, kalium, dekstrosa, sukrosa (gula tebu), dan enzim bromelain. Bromelain berkhasiat antiradang, membantu melunakkan makanan di lambung, mengganggu pertumbuhan set kanker, menghambat agregasi platelet, dan mempunyai aktivitas fibrinolitik. Kandungan seratnya dapat mempermudah buang air besar pada penderita sembelit (konstipasi). Daun mengandung calcium oksalat dan pectic substances.

Beberapa penyakit yang dapat ditanggulangi dengan nanas, diantaranya rasa penuh di lambung, sembelit, radang tenggorok, menurunkan berat badan, beri-beri, keseleo, bengkak terpukul, darah mudah menggumpal (blood coagulation), aterosklerosis (penyempitan pembuluh darah), menghambat pertumbuhan tumor, meningkatkan penyerapan (absorbs) obat, terlambat haid dan cacingan.

Dalam proses penggunaan untuk pengobatan, buah nanas diolah dengan beragam bentuk. Misalnya untuk obat yang harus diminum,



maka dapat menggunakan nanas dalam bentuk jus. Obat yang diminum, jus 1/2-2 buah nanas ukuran sedang atau dapat juga diparut, lalu minum. Untuk pemakaian obat luar, kupas buah nanas, lalu parut. Turapkan hasil parutannya pada bagian tubuh yang sakit, seperti membersihkan jaringan mati (debridement) pada luka bakar, ketombe, bisul, koreng, dan radang kulit (dermatitis). Cara lain, tumbuk daun nanas sampai halus, lalu balurkan pada luka bakar, bisul, dan gatal-gatal.

Untuk menanggulangi masalah penyakit cacingan, kupas 1 buah nanas muda, lalu cuci sampai bersih. Selanjutnya, bilas dengan air masak, lalu parut. Peras dan saring hasil parutannya, lalu minumkan pada anak yang cacingan sedikit demi sedikit. Jika anda keseleo atau memar akibat terpukul, cukup kupas 1 buah nanas yang sudah masak, potong-potong, lalu dijus. Minum air yang terkumpul sekaligus.

Tapi jika terkena radang tenggorokan, maka anda harus mengupas 2 buah nanas sekaligus yang telah masak, lalu cuci sampai bersih. Potong-potong, lalu dijus atau diparut. Selanjutnya, peras menggunakan sepotong kain bersih. Minum air perasan yang terkumpul, sehari 3 kali, setiap kali cukup 1/3 bagian.

Peradangan di kulit (dermatitis), dapat ditanggulangi juga dengan buah nanas. Cukup sediakan 1/2 buah nanas yang telah masak. Kupas kulitnya, lalu parut. Hasil parutannya dipakai untuk menggosok kulit yang bersisik dan mengelupas, baik di kulit kepala atau bagian lain dari tubuh. Lakukan sekali sehari, malam sebelum tidur. Keesokan paginya baru dicuci bersih. Lakukan setiap hari. Ketombe juga diatasi dengan 1/4 buah nanas masak. Kupas kulitnya, lalu parut, peras, dan saring. Tambahkan air perasan 1 buah jeruk nipis dan aduk sampai rata. Gunakan ramuan ini untuk menggosok kulit kepala yang berketombe. Lakukan malam sebelum tidur. Keesokan paginya rambut dikeramas. Lakukan 2-3 kali dalam seminggu.

Nah, jika anda merasa kelebihan berat badan. Dan telah tiba rasanya bersiap ingin tampil langsing, maka tidak perlu melakukan diet super ketat atau memforsir tubuh dengan olahraga yang melebihi tenaga atlet pada umumnya. Cukup dengan mengkonsumsi nanas secara rutin, maka berat tubuh dapat terjaga bahkan dapat turun sempurna. Caranya, kupas 1 buah nanas yang tidak terlalu matang, lalu cuci sampai bersih. Potong-potong, lalu dijus atau diparut. Selanjutnya, peras menggunakan sepotong kain bersih dan air perasannya langsung diminum





sekaligus. Lakukan 2 kali sehari.

Sembelit memang bikin sakit. Tapi tidak perlu menghajarnya dengan mengonsumsi obat-obat pencahar, yang jika tidak terkontrol maka justru akan berbahaya bagi kesehatan. Cukup mengupas 3 buah nanas yang belum masak, lalu cuci sampai bersih. Selanjutnya, jus atau parut, lalu peras. Minum air perasannya setelah makan, sehari 2 kali, masing-masing cukup 1/2 gelas.

Penyakit Beri-beri yang membengkakkan tubuh juga dapat diatasi dengan resep tradisional berikut. Kupas 2 buah nanas yang sudah masak, lalu cuci sampai bersih. Selanjutnya, jus atau parut, lalu peras. Minum air perasannya sekaligus. Sebaiknya diminum pagi atau siang hari sesudah makan. Rasa penuh di lambung karena pencernaan terganggu dapat pula disembuhkan dengan meminum jus nanas 3 kali sehari masing-masing 3/4 gelas (150 cc). Lakukan 1/2 jam sebelum makan.

Tidak hanya bagian buahnya, ternyata bagian daun juga berdampak menyembuhkan bagi penyakit. Luka bakar, gatal dan bisul juga dapat kabur dengan daun nanas yang terlihat agak "seram" karena tajam bergerigi. Cuci daun nanas sampai bersih, lalu tumbuk sampai halus. Balurkan pada bagian yang sakit. Daun nanas juga berfungsi sebagai piretik (penurun

panas). Selain bagian buah dan daun yang berkhasiat, bagian kulit nanas juga berfungsi untuk membersihkan batu marmor.

Tetapi jangan lupa. Selain dampak positif, buah nanas juga memiliki efek samping yang harus diwaspadai. Terutama untuk ibu hamil (bumil). Para bumil ini dilarang untuk meminum perasan buah nanas muda karena dapat membahayakan janin. Selain itu, buah nanas di dalam saluran cerna difermentasi menjadi alkohol yang dapat menimbulkan kambuhnya rematik Gout. Dan bagi

nanas dapat mengempukan daging dengan meletakkan potongan nanas di atasnya, namun jangan terlalu lama supaya tidak mengalami kelembekkan.

Meskipun terasa asam buah nanas tidak berbahaya bagi penderita maag. kandungan **phitochemicalnya** dapat menurunkan PH tinggi hingga dapat mengontrol asam lambung. Untuk menambah khasiatnya nanas lebih baik dikonsumsi secara utuh. Seperti untuk campuran selada buah dan es buah. Tetapi perlu diingat juga, nanas yang telah diolah



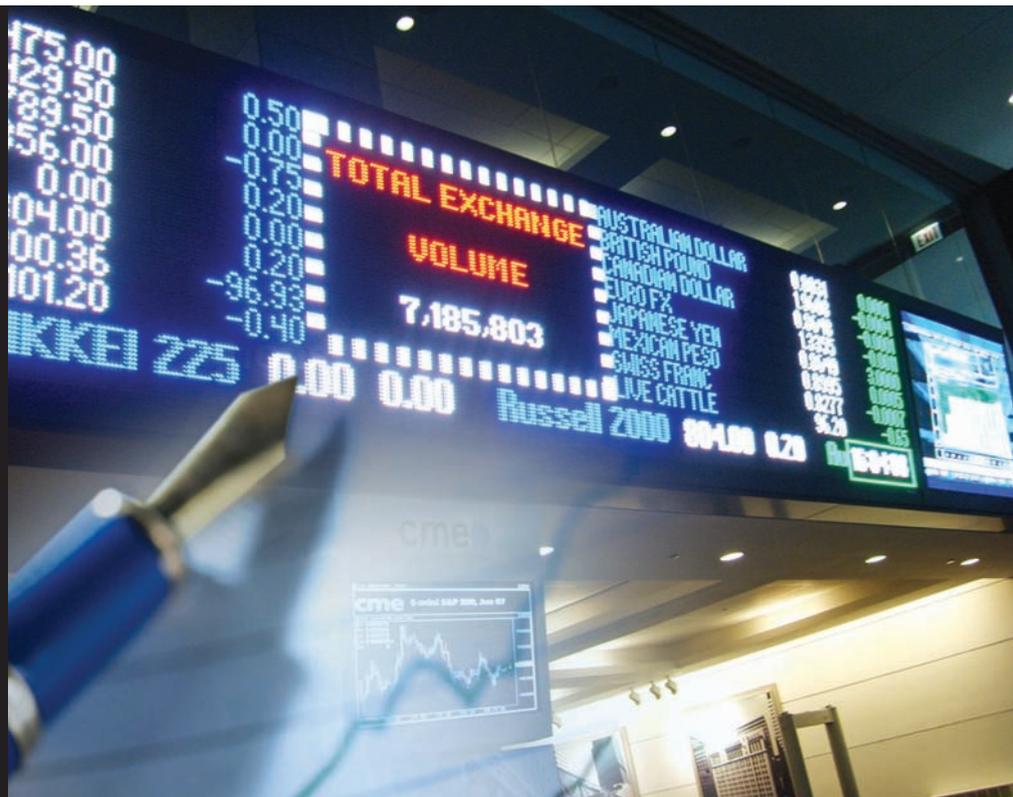
anda yang menderita kencing manis (diabetes mellitus) dianjurkan untuk membatasi dalam mengonsumsi buah nanas karena kandungan gula buah yang masak cukup tinggi.

Nanas mengandung Vitamin C yang cukup tinggi atau sekitar 12 mg dalam 78 gr. Nanas juga mengandung phitochemical yang baik untuk kesehatan. Phitochemical adalah zat, bukan gizi yang dapat dijumpai pada tumbuhan yang memiliki aktifitas biologi yang menguntungkan tubuh, yakni sebagai **antioksidan**. Selain itu nanas juga mengandung enzim bromelain yang dapat mengubah protein pada susu daging dan gelatin sehingga membuat bahan makanan menjadi basah. Karena sifatnya itu,

menjadi dodol nanas, kripik nanas atau olahan nanas lainnya, zat gizi atau enzimnya sudah tidak utuh lagi. Agar dapat memanfaatkan nanas secara optimal kita juga perlu memanfaatkan kualitas dari nanas tadi. Pilihlah nanas yang telah matang, jangan yang rusak atau cacat yang warnanya kecoklatan dan kalau bisa yang masih mengandung kadar air. Tetapi selain dimakan dan untuk merawat kecantikan, serat nanas juga bisa dipergunakan sebagai *fashion style*. Bukan suatu hal baru jika kita mengenal serat nanas sebagai bahan pakaian. Pakaian berhias serat nanas dijual dengan harga yang berkelas, bahkan saat ini tengah populer jilbab dari serat nanas. Menarik, unik dan khas. ▲

PP No. 17 'Dihajar' Judicial Review

Proses “kelahiran” PP No. 17 Tahun 2009 dianggap prematur. Belum matang pemahaman telah meluncur. Apalagi kemudian dikhawatirkan bakal bikin bisnis perdagangan berjangka hancur. Akhirnya APBI dan IP2BI pun sepakat melebur. Judicial Review diajukan demi taktik tempur. Ya, setidaknya laju PP tersebut dibuat kendur.



Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivative berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa sebelumnya dikeluarkan Presiden RI pada 9 Februari 2009 lalu. Tentu kita masih ingat betapa “hebohnya” pelaku bisnis perdagangan berjangka dari dampak dikeluarkannya PP tersebut. Istilahnya, bukan karena tak cinta pajak, tetapi memang peraturan tersebut dianggap tak memihak.

Pada April lalu, memang Mendag Mari Elka Pangestu telah berkirim surat pula kepada Menkeu Sri Mulyani Indrawati untuk mengusulkan besaran pajak bagi SPA yang disetarakan dengan pasar modal. Kepala Bappebti Deddy Saleh juga mengungkapkan,

pada dasarnya Mendag setuju jika SPA dikenakan pajak. Tetapi besaran angkanya sama dengan pasar modal, yakni 0,1 persen untuk dua sisi dan tidak diberlakukan mundur.

Mendag mengusulkan diantaranya tarif PPh final sebesar 2,5 persen dari margin awal diturunkan dan disamakan dengan pasar modal, atau sebesar 0,01 persen untuk dua posisi jual dan 0,05 persen untuk posisi beli. Usulan lain juga dilakukan Mendag melalui surat tersebut, dimana PPh tersebut berlaku efektif 1 bulan setelah penetapan PPh final atau tidak berlaku surut. Sebab seperti dijelaskan Deddy Saleh, memang dibutuhkan waktu untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada nasabah pembayar pajak. Selain itu, surat Mendag tersebut juga menegaskan, jika pengenaan pajak

sebesar 2,5 persen yang dihitung dari margin awal memang berisiko mematikan industri perdagangan berjangka.

Pajak penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pada Pasal 4 Ayat 1 disebutkan: “Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak”. Sementara dalam PP No. 17 tahun 2009, terhadap margin awal telah dibebani pajak penghasilan sebesar 2,5 persen disaat penyetoran margin awal. Padahal margin awal merupakan suatu jaminan transaksi yang dapat berupa uang dan surat berharga.

Karena menilai PP No. 17 ini salah

kaprah dan sangat memberatkan industri bisnis perdagangan berjangka, maka para pelaku bisnis diindustri ini telah melakukan upaya untuk melakukan mediasi. Mulai dari berkorespondensi dengan pihak Dirjen Pajak untuk mendiskusikan permasalahan tersebut. Bahkan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri Keuangan Srimulyani sampai turun tangan. Tetapi yang terjadi kemudian juga tak sesuai harapan. Sehingga akhirnya pihak Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI) dan Ikatan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI) sepakat untuk mendaftarkan gugatan judicial review atas PP No. 17 tahun 2009 tersebut ke Mahkamah Agung (MA), Rabut, 15 Juli 2009.

Ketua APBI, I Gede Raka Tantra mengungkapkan, pihaknya menganggap besaran pajak penghasilan yang sebesar 2,5 persen itu sangat tidak masuk akal dan kemungkinan besar dapat mematikan industri ini. Selain itu PP tersebut juga bersifat diskriminatif karena transaksi derivative di bursa saham yang mempunyai karakteristik yang sama hanya dibebani 0,1 persen.

"Jadi perlu ditegaskan. Bukannya kami tidak mau membayar pajak. Sebagai warga negara yang baik, kami tentu harus patuh terhadap peraturan. Cuma masalahnya, peraturan ini sangat memberatkan dan cenderung justru akan mematikan industri perdagangan berjangka itu sendiri," terang I Gede Raka Tantra, pada saat konferensi pers di gedung APBI Jakarta, yang didampingi Ketua IP2BI Gregorius Teddy Gunawan, Wakil Ketua APBI Bihar Sakti Wibowo dan kuasa hukumnya Henry David Oliver Sitorus.

Sebelumnya, menurut Gede, sudah ada bentuk upaya "damai" yang dikeluarkan. Telah terjadi sekitar dua kali proses diskusi dengan pihak Dirjen Pajak, yang kemudian memang mengakui adanya proses kesalahan. Selanjutnya, besar 2,5 persen tersebut diajukan melorot menjadi sebesar 1,25 persen bagi penjual dan pembeli. Dan para pelaku pasar merasa besaran itu dinilai tetap memberatkan seperti ketentuan sebelumnya.

"Kalau mau merevisi atau mencabut,



kita hargai. Prinsipnya, kita tidak ingin menjegal untuk pajak. Kita tetap ingin kooperatif. Sebab jika industri ini mati, semua mati, Dari jumlah 65 pialang aktif dan 100 trader, diperkirakan telah terhimpun minimal 1,6 juta tenaga kerja. Jika bisnis ini mati, betapa banyaknya pengangguran. Petani pun gagal melakukan hedging,"

Dia juga memaparkan, sejak krisis financial melanda jumlah pialang menurun tajam. Dari 80 anggota, menjadi melorot hanya 65 saja. Belum lagi ditambah dengan PP yang memberatkan ini. Mengenai usulan Mendag ke Menkeu mengenai kemungkinan pajak ini akan diperluas ke SPA, maka Gede mengaku pihaknya tidak berkeberatan. Asal syaratnya hanya 0,1 persen.

"Kalau bursa ini mau dibandingkan dengan BEI, ya, susah. Ibaratnya, BEI itu sudah mapan. Sementara industri perdagangan berjangka ini baru sekitar 8 tahun berkembang di tanah air. Tapi BEI dikenakan pajak hanya 0,1 persen. Nah kita? 2,5 persen!"

Gregorius Teddy Gunawan juga menegaskan, intinya pihaknya menolak PP No. 17 tersebut. Kalau bisa, malah dibatalkan saja. Karena dampak negatifnya sangat besar terhadap perkembangan bisnis perdagangan berjangka di tanah air. Salah satunya, dapat membuat orang yang sebelumnya "bermain" di bursa

dalam negeri menjadi ramai-ramai hijrah ke bursa luar negeri. "Trading kan *on-line*, untuk bisa trading kan bisa dimana saja. Alangkah baiknya jika orang Indonesia ini istilahnya main di rumah sendiri"

Bihar Sakti Wibowo juga mengkhawatirkan "tenggelam"nya bisnis perdagangan berjangka akibat pemberlakuan PP No. 17 tersebut. Sebab menurutnya, yang harus dilihat adalah efek dan manfaat ekonomi dari keberadaan bisnis ini, selain unsur spekulasi. Kemungkinan orang Indonesia akan kabur trading ke luar negeri pun digaribawahi. Jika pelaku pasar lokal dijerat dengan pajak yang begitu tinggi, tentu akhirnya mereka lebih memilih lari ke luar negeri.

"Apalagi di sana (bursa luar) rapi, bersih. Di sini (Indonesia) masih berantakan. Tentu orang akan lebih memilih ke luar negeri kan? Ya, kalau bisa. Pajak ini jangan lebih berat dari tetangga sebelah" seloroh Bihar.

Henry David Oliver Sitorus, sebagai kuasa hukum dari APBI dan IP2BI membenarkan jika pihaknya telah mengajukan gugatan untuk menolak pemberlakuan pasal 2, pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 serta pasal 5 PP No.17 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivative berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Serta meminta kepada Mahkamah Agung RI untuk mencabut atau membatalkan ketentuan-ketentuan tersebut.

"Kami mengupayakan agar PP ini jangan diberlakukan dulu. PP ini banyak ditolak. Jadi mengajukan gugatan ini merupakan suatu bentuk upaya perlawanan. Jadi bukan masalah kalah atau menang. Ini upaya untuk men-*trigger* pemerintah. Kita juga mengharapkan agar departemen terkait jangan dulu menerbitkan juklaknya."

PP yang sudah terbit sekitar 5 bulan ini, mestinya secara umum dapat dijalankan. Tetapi pada keadaan riil, ada penolakan. Sampai gugatan ini diputuskan MA, diharapkan pemerintah dan instansi terkait tidak memaksakan. Karena target utama dari para penggugatan adalah pembatalan. ▲

■ Bappebti Menang Atas Gugatan GFB

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabarkan Kepala Bappebti selaku tergugat/pembanding menang dalam perkara antara PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) sebagai pihak Tergugat I/Pembanding dan Kepala Bappebti sebagai Tergugat II/Pembanding melawan PT. Graha Finesa Berjangka (pengugat/Terbanding) Keputusan PTUN itu disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Putusan Banding No. 45/B/2009/PT.TUN.JAKARTA, tertanggal 13 Juli 2009.

Perkara ini dimulai dari gugatan PT. Graha Finesa Berjangka (GFB) pada PTUN tanggal 14 Agustus 2008 atas Keputusan Kepala Bappebti Nomor 418/BAPPEBTI/SA/7/2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Graha Finesa Berjangka dan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 419/BAPPEBTI/SA/7/2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Pencabutan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka. Dalam gugatannya, GFB meminta agar Majelis Hakim PTUN memerintahkan untuk mencabut kedua surat keputusan Kepala Bappebti, dan menghidupkan kembali izin usaha GFB.

Pada tanggal 24 Nopember 2008, Majelis PTUN mengabulkan seluruh gugatan GFB dan memerintahkan agar Kepala Bappebti menghidupkan kembali izin tersebut. Atas putusan tersebut Bappebti dan BBJ merasa keberatan dan mengajukan banding pada tanggal 1 Desember 2008. Setelah melalui beberapa kali proses persidangan, akhirnya pada tanggal 13 Juli 2009, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi – TUN menolak gugatan GFB dan menghukum GFB untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat pengadilan. ▲

■ Pelaku SPA Wajib Laporkan Transaksi

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan peraturan baru mengenai kewajiban pelaporan dan pendaftaran transaksi dalam sistem perdagangan alternatif (SPA). Peraturan baru No. 70/BAPPEBTI/Per/7/2009 tersebut diterbitkan Kepala Bappebti Deddy Saleh, pada 7 Juli 2009.

Dalam peraturan ini dijelaskan, jika Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) maupun Penyelenggara SPA wajib melaporkan setiap pelaksanaan transaksi Nasabah ke Bursa Berjangka dan mendaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka melalui sistem yang disediakan oleh Penyelenggara SPA.

Selain kewajiban tersebut, terdapat juga sanksi yang akan diberlakukan apabila Peserta SPA terbukti melanggar ketentuan ini. Yakni wajib mengembalikan dana Nasabah yang terkait dengan transaksi yang tidak dilaporkan. Dan apabila Penyelenggara SPA terbukti melanggar ketentuan ini, maka berkewajiban pula menanggung seluruh kerugian yang timbul akibat dari transaksi yang tidak dilaporkan dan/atau didaftarkan.

Dengan peraturan baru ini juga para Pialang Berjangka diharuskan untuk melakukan transaksi secara transparan dengan melaporkannya ke PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) sehingga upaya monitoring dapat dilaksanakan secara efektif. ▲

■ Bank Century Kembali 'Berseri'

Setelah mendapat 'pertolongan' dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), PT Bank Century kembali dapat melakukan aktivitas perbankan khususnya penyimpanan dana nasabah dalam transaksi perdagangan berjangka. Kembailnya Bank Century sebagai bank penyimpan margin nasabah, dipastikan Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Made Sukarwo, melalui Surat Edaran No. 418/Bappebti/7/2009, tertanggal 9 Juli 2009.

Bank Century mendapat persetujuan sebagai bank penyimpan dana margin nasabah perdagangan berjangka melalui SK Kepala Bappebti No. 939/Bappebti/SP/9/2006.

Sejak Bank Century diambil alih pengelolaannya oleh



LPS pada November 2008, nilai assetnya kini pun makin bertambah. Total asset Bank Century per 30 Juni 2009, meningkat sekitar Rp 1 triliun menjadi Rp 6.626 triliun.

Dengan aktifnya Bank Century sebagai bank penyimpan dana margin nasabah perdagangan berjangka komoditi, hingga saat ini terdapat 5 bank penyimpan dana margin. Masing-masing, BCA, CIMB Niaga, Bank Century, Bank Sinar Mas dan BNI 46. ▲

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Deddy Saleh, mengatakan, para penyidik kepolisian membutuhkan pengetahuan khusus untuk memproses kasus perdagangan berjangka komoditi. Selama ini, kasus-kasus perdagangan berjangka yang dilaporkan ke pihak kepolisian hanya ditangani bagian umum yang menangani kasus kriminal biasa. Sehingga pihak kepolisian menjadi kesulitan saat menghadapi kasus tersebut.

Menurut Deddy, kasus yang terjadi di bisnis perdagangan berjangka modusnya tentu berseberangan dengan kasus penipuan umum. Bappebti mengharapkan agar pihak Kepolisian segera membentuk unit khusus demi mengantisipasi konflik hukum, serta “menyamankan” para pemilik modal melalui kepastian hukum.

Sementara itu, Kepala Biro

■ ■ ■ ■ Bappebti Sarankan Kasus PBK Ditangani Unit Khusus

Hukum Bappebti, Alfons Samosir, menjelaskan, jika upaya Bappebti ‘merapatkan barisan’ ke aparat penegak hukum tidak lain untuk

lebih bersinergi demi memperbaiki citra bisnis perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. ▲



■ ■ ■ ■ Single Platform Tunggu 'Lampu Hijau' BBJ

Kepala Bappebti Deddy Saleh, mengungkapkan, sudah mulai ada titik terang mengenai nasib *single platform*. Keputusan terakhir tentu saja bermuara kepada PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Berbeda dengan sebelumnya yang tidak ada kepastian menggunakan teknologi siapa yang akan digunakan, kali ini Deddy Saleh bahkan berani memprediksi bahwa BBJ akan mempergunakan vendor Ariell asal United Kingdom.

“Mengenai *single platform*, kita masih menunggu keputusan Pak Hasan (Dirut BBJ). Kalau soal vendor, kemungkinan besar akan menggunakan Ariell. Karena dia mampu memenuhi semua fungsi, terutama mengenai masalah pengintegrasian. Sehingga administrator betul-betul dapat diawasi. Kalau ada *warning* dapat dicek. Kita mengharapkan, dalam waktu dekat ini sudah ada keputusan,” jelas Deddy. Sebelumnya, Deddy Saleh sempat

mengungkapkan kekecewaannya, setelah persetujuan pihaknya terhadap Ariell terkesan kurang “bersambut” pihak BBJ. Sementara batas waktu rencana peluncuran *single platform* malah semakin molor. Apalagi kemudian BBJ mengungkap rencana untuk “menarik” vendor lokal, padahal sebelumnya sudah digelar “tes” persaingan 5 vendor dari lokal dan internasional.

Divisi IT BBJ, Lukas Lauw tidak menampik jika memang terkesan ada “tarik-ulur” soal penetapan vendor tersebut. Sebelumnya Lukas menyinggung soal *budget* yang sempat membuat pihaknya sampai hampir menggelar pemilihan vendor “*session*” 2 yang konon kandidatnya bahkan dari lokal semua.

“Masalah *single platform*, itu sudah sejak satu bulan ini telah berada di komite. Komite itu terdiri dari BBJ, KBI, APBI dan IP2BI. Ya, kita tunggu keputusannya ya” kata Lukas. ▲

Winnie E Hassan, Ketua Asbanda

BPD HARUS CEPAT RESPON SRG

Dikalangan perbankan nasional nama yang satu ini tidaklah asing, Winnie Erwindia Hassan, begitu nama lengkapnya. Ditemui disuatu kesempatan lokakarya Sistem Resi Gudang (SRG), di Jakarta, ada saja perbincangan yang menarik dari Dirut BPD DKI Jakarta, ini. Dan itulah ciri khas wanita kelahiran, Tegal, Jateng, 11 Januari 1951, itu, bicara apa adanya, supel dan yang pasti penuh humor.

Ketika percibangan beralih kebisnis perbankan terutama bisnis bank pembangunan daerah, dengan penuh antusias Winnie pun bersemangat. "BPD itu ya, seharusnya bisa lebih berkembang karena dimiliki pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, BPD harus mengetahui dan memenuhi apa saja kebutuhan masyarakat akan produk-produk perbankan. Terutama yang dapat mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat setempat," katanya.

Seperti instrument pembiayaan sistem resi gudang ini, tambahnya, merupakan instrument yang benar-benar membantu sektor riil. Seharusnya, ya, BPD cepat merespon peluang ini. Karena BPD 'kan ada di daerah, dan lebih mudah mengetahui latar belakang masyarakat atau pun nasabahnya.

"Apa lagi saat ini seluruh BPD sudah bisa on-line, sehingga sistem resi gudang dapat dilakukan disemua daerah. Kami pun (BPD DKI Jakarta-Red), sudah mencoba mempelajari lebih dalam instrumen ini, dengan

belajar dari pengalaman BPD Jatim yang sudah terlebih dahulu mengimplementasikan SRG," ungkap Winnie yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) itu.

"Saya pikir, instrument SRG ini sesuai dengan misi BPD dalam mengembangkan dan membangun ekonomi daerah. Karenanya saya berharap BPD lebih cepat tanggap dibandingkan bank nasional lainnya dalam pengembangan SRG," jelasnya.

"Jika BPD ingin maju dan menjadi kebanggaan masyarakat, jangan lagi tergiur dengan produk-produk perbankan komersial lainnya. Melainkan mengembangkan produk-produk perbankan yang berorientasi pada peningkatan produktifitas masyarakat setempat, seperti pembiayaan SRG ini," tegas Winnie.

PERJALANAN KARIER

* Dirut BPD DKI Jakarta dari tahun 2006 – sekarang. * Organisasi yang dipimpin antara lain, Ketua Umum Asbanda dan Ketua KONI DKI Jakarta. * Karier diperbankkan diawali dari level paling bawah. Pada tahun 1974, sebagai resepsionis, service assistant, costumer service Bank Niaga, Tunjungan, Surabaya. * Setelah mengikuti berbagai pendidikan dan pengembangan karier, dipercaya memimpin beberapa posisi penting di Bank Niaga, diantaranya sebagai Pemimpin Cabang Surabaya Darmo, Pemimpin Cabang Utama Surabaya Tunjungan dan Area Manager II (Indonesia Timur) dan sebagai Asistant to BOD Bank Niaga untuk Product Development dan Corporate Planning. * Kemudian sebagai General Manager di Bank Bumiputera. * Lalu pindah ke Bank Jaya sebagai Direktur Pemasaran. * Kembali lagi ke Bank Bumiputera dan berturut-turut menjabat Direktur Individual Banking dan Operation, Direktur Kepatuhan, dan terakhir sebagai Presiden Direktur Bank Bumiputera.



Dalam perbincangan ringan dan santai itu, Winnie pun sesekali mengangkat dan memperhatikan pesawat telepon genggam miliknya. Dan spontan saja, senyum sumirat pun menghiasi wajahnya.

"Maaf ya, pembicaraan kita terpotong. Baru saja cucu saya kirim pesan lewat *facebook*," cetusnya.

Dibalas dengan senyum, dia pun melanjutkan kata-katanya. "Meski sudah tua, kita tidak boleh ketinggalan teknologi informasi," katanya. Semula saya tidak tahu apa itu *facebook*, tetapi setelah dijelaskan dan dibuatkan address-nya oleh cucu, ternyata cukup menarik. Sama cucu saya itu, di *facebook* nama saya dibikin *winnie d phooh*. Dan sekali lagi dia pun spontan tertawa lebar. ▲